

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tujuan dari literatur review ini adalah untuk menyediakan fondasi teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang penulis lakukan. Ini dilakukan agar penulis memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai masalah dan agar penelitian dapat dilakukan secara objektif dengan menggunakan kerangka berpikir ilmiah. Selain itu, penulis menggunakan berbagai literatur guna memperoleh dasar teori yang bisa menunjang penulis memecahkan masalah penelitian. Penulis menggunakan literatur ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Untuk mencapai tujuan ini, ulasan literatur terhadap beberapa sumber yang digunakan diberikan di sini.

Literatur pertama dari buku berjudul *Climate change and small island states: power, knowledge and the South Pacific*. Earthscan karya Barnett & Campbell, 2010. Buku ini menganalisis dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan di Pasifik. Penelitian ini menggambarkan bagaimana negara-negara pulau menghadapi kerentanan dan tantangan yang unik akibat perubahan iklim dan mempertimbangkan aspek-aspek kekuasaan dan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan adaptasi. Buku ini mengkaji secara kritis bagaimana sains dan kebijakan terkait perubahan iklim telah memperlakukan negara-negara kepulauan kecil, khususnya di kawasan Pasifik Selatan. Barnett & Campbell berargumen bahwa meskipun negara-negara ini sering digambarkan sebagai yang

paling terdampak akan perubahan iklim, produksi pengetahuan ilmiah dan kebijakan untuk melindungi hak-hak bangsa dan penduduk di pulau-pulau ini justru berjalan lambat.

Buku ini menelusuri sejarah bagaimana sains iklim berkembang menjadi sebuah "*big science*" yang didominasi oleh negara-negara besar dan kaya. Meskipun ada upaya untuk melibatkan ilmuwan dari negara berkembang, namun keterwakilan dari negara-negara berkembang masih terbatas. Dalam konteks Pasifik, beberapa inisiatif ilmiah regional dibahas, seperti SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment*), tetapi inisiatif-inisiatif tersebut juga menghadapi berbagai kendala. Dalam hal kebijakan, buku ini memaparkan perkembangan rezim kebijakan perubahan iklim global seperti UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan Protokol Kyoto, serta peran AOSIS (*Alliance of Small Island State*) dan negara berkembang lainnya. Namun, kepentingan pulau-pulau kecil seringkali tersisihkan dalam proses kebijakan yang didominasi negara-negara besar. Buku ini juga mengkritik beberapa program adaptasi iklim di Pasifik yang dianggap terlalu sempit fokusnya.

Secara konseptual, buku ini mengkritik bagaimana "kerentanan" pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim sering digambarkan. Para penulis berargumen bahwa wacana kerentanan seringkali dibangun dengan membingkai pulau-pulau sebagai "terpencil", "kecil" dan "rapuh". Ini menyederhanakan realitas dan mengabaikan kapasitas adaptasi masyarakat pulau. Wacana "pengungsi iklim" menggambarkan ketidakberdayaan dan mengabaikan aspirasi penduduk setempat. Buku ini memberikan sudut pandang kritis dan alternatif

dalam memandang hubungan antara perubahan iklim dan negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. Ini menyoroti perlunya mempertimbangkan pengetahuan lokal, nilai-nilai dan aspirasi penduduk dalam merumuskan kebijakan adaptasi yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Barnett & Campbell terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perubahan iklim di wilayah pasifik dan peranan dari aktor-aktor non negara. Ada pula perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Barnett & Campbell memiliki keterbatasan karena fokus penelitiannya pada tahun 2010 dan mencakup semua kawasan di kepulauan Pasifik sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada kawasan Pasifik Selatan.

Literatur kedua dari jurnal yang berjudul *Climate Change will Cause The Next Migrant Krisis* : Studi Kasus Kiribati karya Putu Ratih Kumala Dewi, 2017. Jurnal ini membahas mengenai dampak perubahan iklim yang akan menyebabkan krisis migrasi berikutnya. Perubahan iklim yang berlangsung hingga saat ini , terutama disebabkan oleh pemanasan global, memiliki konsekuensi serius bagi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan data, level air laut telah naik sekitar 8 inci (20 cm) sejak 1900. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan permukaan air laut akan naik 1-4 kaki (0,3-1,2 meter) pada akhir abad ini. Kenaikan ini akan berdampak serius bagi jutaan orang yang tinggal di daerah pesisir, terutama negara-negara kepulauan dan pesisir rendah.

Beberapa wilayah yang terancam karena naiknya permukaan air laut, antara lain Bangladesh, Kepulauan Pasifik, dan pesisir Afrika. Diperkirakan, 50 juta hingga 200 juta orang akan terancam terdampak oleh kenaikan air laut pada tahun 2050. Kepulauan Pasifik akan menghadapi berbagai konsekuensi, seperti banjir, intrusi air laut, erosi pantai, dan kehilangan lahan pertanian. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya terbatas pada kenaikan air laut, tetapi juga perubahan pola cuaca ekstrem. Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai tropis, kekeringan, dan kebakaran hutan, semakin sering terjadi dan berpotensi menghancurkan mata pencaharian masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Kondisi-kondisi ini akan memaksa jutaan orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Migrasi yang dipicu oleh perubahan iklim ini berpotensi menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di masa depan.

Pemerintah dan lembaga internasional perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ancaman ini. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus diprioritaskan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, penataan tata ruang wilayah pesisir, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, perlu ada kerja sama global yang lebih erat untuk memfasilitasi proses migrasi yang terjadi. Hal ini mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan, akomodasi, serta integrasi sosial-ekonomi bagi para migran iklim. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari krisis migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim di masa mendatang.

Dari kesimpulan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai dampak perubahan iklim yang akan menyebabkan krisis migrasi berikutnya. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada isu yang dibahas yaitu perubahan iklim, adapun perbedaannya terletak pada rentan waktu penelitian dan fokus dari penelitian tersebut yaitu meningkatnya krisis migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Literatur ketiga dari Jurnal yang berjudul *Analisis Kerjasama Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme (SPREP) Terkait Perubahan Iklim* karya (Princesa et al., 2021). Jurnal ini membahas peran dan kerjasama *Secretariat of the Pasific Regional Environment Programme (SPREP)* terkait perubahan iklim, dalam menangani perubahan iklim di wilayah Kepulauan Pasifik. SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) adalah badan antar pemerintah yang dibentuk untuk mempromosikan kerjasama regional, memberikan bantuan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan di Pasifik. Jurnal ini menjelaskan latar belakang pembentukan SPREP pada tahun 1973 sebagai bagian dari Komisi Pasifik Selatan, yang kemudian berkembang menjadi badan otonom pada tahun 1982 karena meningkatnya isu-isu lingkungan di kawasan Pasifik. Saat ini, SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) memiliki 21 negara anggota Pasifik serta 5 negara maju sebagai anggota. SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) berperan penting dalam upaya penanganan perubahan iklim di Pasifik, seperti melalui program-program regional untuk CCA (*Climate Change Adaptation*) dan pengurangan risiko bencana (DRR). Jurnal ini juga menjelaskan struktur organisasi SPREP

(*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) dan berbagai program yang dilaksanakan terkait isu perubahan iklim. Jurnal ini ingin menjawab pertanyaan mengenai peran dan kerjasama SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) dalam menangani perubahan iklim di kawasan Kepulauan Pasifik. SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) berperan penting dalam mengkoordinasikan berbagai program CCA (*Climate Change Adaptation*) dan pengurangan risiko bencana (DRR) di kawasan Pasifik. Artikel ini menunjukkan bahwa SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) telah menjadi pusat keunggulan geografis dan badan terkemuka untuk Pasifik di bidang perubahan iklim. Secara keseluruhan, jurnal ini menggambarkan bahwa SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) telah menjadi mitra penting bagi negara-negara Pasifik dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) telah menjadi badan antar pemerintah yang penting dalam upaya penanganan perubahan iklim di Kepulauan Pasifik. Melalui kerjasama regional, SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*) memberikan bantuan dan layanan konsultasi teknis kepada negara-negara Pasifik untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan.

Persamaan dan perbedaan kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas perubahan iklim dan organisasi regional pasifik yaitu SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*), perbedaannya

yaitu penelitian tersebut berfokus pada analisis kerjasama yang dilakukan oleh SPREP (*Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme*).

Literatur keempat dari Jurnal *Sinking into the Sea? Climate Change and AOSIS Strategies* karya (Gert Tinggaard Svendsen, 2017) Jurnal ini membahas ancaman serius perubahan iklim bagi negara-negara kepulauan berkembang kecil SIDS (*Small Island Developing State*) dan strategi organisasi perwakilan mereka, AOSIS (*Alliance of Small Island States*), untuk menghadapinya. SIDS (*Small Island Developing State*), yang terdiri dari 57 pulau rendah dan komunitas pesisir di seluruh dunia, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut yang dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil mereka. Perubahan iklim tidak lagi membutuhkan ratusan tahun untuk menimbulkan biaya yang sangat besar bagi populasi planet ini. Laporan terbaru dari AMAP (*Arctic Monitoring and Assessment Program*) menunjukkan bahwa kenaikan suhu di wilayah Arktik menyebabkan naiknya permukaan laut lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Hal ini membuat solusi berkelanjutan untuk masalah iklim semakin mendesak.

Berbeda dengan negara-negara kaya berpedalaman rendah lainnya seperti Belanda, SIDS (*Small Island Developing State*) tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun bendungan guna melindungi diri dari kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada inisiatif aktor-aktor besar lainnya. Sebagai kelompok pulau-pulau kecil, SIDS (*Small Island Developing State*) memiliki peluang terbatas untuk memainkan peran besar dalam negosiasi internasional. Meskipun penggunaan istilah "SIDS" didukung secara luas, tidak semua negara anggotanya sepenuhnya memenuhi definisi sebagai

negara kepulauan berkembang kecil. Dalam menghadapi tantangan ini, AOSIS (*Alliance of Small Island States*), sebagai organisasi yang mewakili SIDS (*Small Island Developing State*), berusaha mendorong kebijakan iklim yang lebih ambisius untuk melindungi warga negaranya. Jurnal ini menyarankan lima strategi utama yang dapat digunakan AOSIS (*Alliance of Small Island States*) yaitu :

1. Penerapan sanksi dalam Perjanjian Paris.
2. Pengenalan pajak karbon.
3. Subsidi untuk teknologi hijau baru.
4. Mencari mitra koalisi, seperti negara-negara besar.
5. Memperkuat fokus pada kaitan antara perubahan iklim dan migrasi masa depan.

Penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat menyelamatkan SIDS (*Small Island Developing State*) dari tenggelam ke dalam laut dan sekaligus memastikan tercapainya target dari Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Sebagai kelompok negara yang sangat rentan, SIDS (*Small Island Developing State*) harus memperjuangkan kepentingan mereka secara efektif melalui AOSIS (*Alliance of Small Island States*) di forum internasional. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan urgensi masalah perubahan iklim bagi SIDS (*Small Island Developing State*) dan perlunya strategi-strategi inovatif dari organisasi perwakilan mereka, AOSIS (*Alliance of Small Island States*), untuk mendorong kebijakan iklim yang lebih ambisius di masa depan. Hal ini demi mencegah tenggelamnya pulau-pulau kecil dan melindungi warga negaranya dari ancaman bencana iklim.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya sama-sama membahas perubahan iklim di wilayah Pasifik khususnya negara-negara kepulauan kecil. Tidak hanya persamaan, diantara kedua penelitian terdapat perbedaan yaitu program yang dibahas serta rentang waktu penelitian.

Literatur kelima dari Jurnal yang berjudul *No change from climate change: vulnerability and small island developing states* karya Kelman, 2014. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana fokus pada perubahan iklim dapat mendepolisasi tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang kepulauan kecil SIDS (*Small Island Developing States*). Jurnal ini menggunakan studi kasus SIDS (*Small Island Developing State*) yang terkena dampak perubahan iklim untuk menunjukkan tiga cara di mana fokus pada perubahan iklim dapat menjauhkan perhatian dari akar masalah yang sebenarnya.

Pertama, fokus pada perubahan iklim cenderung menekankan bahaya fisiknya, bukannya kerentanan SIDS (*Small Island Developing State*). Padahal, kerentanan SIDS (*Small Island Developing State*) tidak hanya disebabkan oleh bahaya fisik perubahan iklim, tetapi juga oleh kondisi politik dan sosial-ekonomi yang mendasarinya, seperti akses yang buruk terhadap sumber daya, ketidaksetaraan, eksploitasi, kurangnya pilihan, marginalisasi, dan ketidakadilan. Dengan hanya fokus pada bahaya fisik, akar masalah kerentanan SIDS (*Small Island Developing State*) menjadi terabaikan. Kedua, fokus pada perubahan iklim cenderung mengalihkan perhatian dari tantangan pembangunan jangka panjang lainnya yang dihadapi SIDS (*Small Island Developing State*). Walaupun

perubahan iklim memang menjadi ancaman besar, namun SIDS juga menghadapi banyak tantangan pembangunan lain yang sama pentingnya, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan terlalu fokus pada perubahan iklim, tantangan-tantangan pembangunan lainnya bisa terabaikan. Ketiga, fokus pada perubahan iklim cenderung mengalihkan perhatian dari peluang-peluang untuk mengurangi kerentanan, termasuk saat rekonstruksi komunitas. Ketika terjadi bencana atau krisis, seringkali ada momentum untuk membangun kembali dengan cara yang lebih tangguh dan mengurangi kerentanan masa depan. Namun, fokus yang berlebihan pada perubahan iklim bisa mengalihkan perhatian dari peluang-peluang ini dan justru membangun kembali dengan kerentanan yang sama seperti sebelumnya.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa perubahan iklim memang merupakan ancaman besar bagi SIDS (*Small Island Developing State*), namun tidak boleh didekati secara terpisah dari konteks politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas. Membingkai perubahan iklim secara terlalu sempit dapat mendepolisasi akar masalah kerentanan SIDS (*Small Island Developing State*) dan mengabaikan tantangan-tantangan pembangunan penting lainnya. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang lebih akurat dan untuk mengatasi situasi SIDS (*Small Island Developing State*) yang kompleks.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas dampak dari perubahan iklim yang melanda wilayah Pasifik dan negara-negara kepulauan kecil. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana jurnal terdahulu berfokus pada kerjasama regional antar negara-negara kepulauan kecil dan berfokus pada perubahan iklim dapat

mendepolisisasi tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang kepulauan kecil.

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

NO	Judul	Penulis	<i>Main Finding</i>
1	<i>Climate change and small island states: power, knowledge and the South Pacific</i>	Barnett & Campbell	<p>Penelitian ini membahas tentang negara-negara kepulauan menghadapi kerentanan dan tantangan unik akibat perubahan iklim, yang dipersulit oleh faktor-faktor seperti keterpencilan, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan pada pariwisata dan pertanian.</p> <p>Penelitian ini mengkritik cara "kerentanan" pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim sering digambarkan. Barnett & Campbell berargumen bahwa wacana kerentanan seringkali membangun pulau-pulau sebagai "terpencil", "kecil" dan "rapuh", yang menyederhanakan realitas dan</p>

			<p>mengabaikan kapasitas adaptasi masyarakat pulau.</p> <p>Penelitian ini menawarkan sudut pandang kritis dan alternatif dalam memandang hubungan antara perubahan iklim dan negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. Ini menyoroti perlunya mempertimbangkan pengetahuan lokal, nilai-nilai dan aspirasi penduduk dalam merumuskan kebijakan adaptasi yang efektif.</p>
2	<p><i>Climate Change will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati</i></p>	<p>Putu Ratih Kumala Dewi</p>	<p>Kenaikan permukaan air laut 8 inci (20 cm) sejak 1900, diprediksi naik 1-4 kaki (0,3-1,2 meter) pada akhir abad ini tentunya ini mengancam jutaan orang di daerah pesisir, terutama negara kepulauan dan pesisir rendah. Kenaikan permukaan air laut tersebut menyebabkan banjir, intrusi air laut, erosi pantai, dan hilangnya lahan pertanian, wilayah yang</p>

			<p>rentan akibat dari kenaikan permukaan air laut tersebut yaitu: Bangladesh, Kepulauan Pasifik, pesisir Afrika. Meningkatnya frekuensi badai tropis, kekeringan, dan kebakaran hutan akan menghancurkan mata pencaharian, terutama di sektor pertanian dan perikanan akan memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal.</p> <p>Migrasi akibat perubahan iklim berpotensi menjadi krisis kemanusiaan terbesar di masa depan. Perlunya penyediaan bantuan kemanusiaan, akomodasi, serta integrasi sosial-ekonomi bagi para migran iklim. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari krisis migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim di masa mendatang.</p>
--	--	--	--

3	<p>Analisis Kerjasama <i>Secretariat of The Pasific Regional Environment Programme</i> (SPREP) Terkait Perubahan Iklim</p>	<p>Regina Princesa, Rudi Kogoya, Renalda Ester, Retta Marito dan Renaldi Christian</p>	<p><i>Secretariat of the Pacific Regional Environment</i> (SPREP) adalah badan antar pemerintah yang dibentuk untuk menangani masalah perubahan iklim. SPREP menangani masalah perubahan iklim di Kepulauan Pasifik dengan mendorong integrasi adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dan pendekatan berbasis ekosistem.</p> <p>SPREP (<i>Secretariat of the Pasific Regional Environment</i>) Dengan proyek PEBACC (<i>Pacific Ecosystem—Based Adaptation to Climate Change</i>), memainkan peran penting. SPREP mengajak negara maju seperti Jerman bekerja sama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik untuk proyek ini. Pemerintah Jerman bertindak sebagai pendonor dalam proyek ini</p>
---	--	--	---

			<p>untuk memastikan program kerjasama berlangsung. Sementara itu, SPREP (<i>Secretariat of the Pasific Regional Environment</i>) berfungsi sebagai pihak pelaksana dalam program kerjasama ini untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan mereka.</p>
4	<p><i>Sinking into the Sea? Climate Change and AOSIS Strategies</i></p>	<p>Gerd Tinggard Svendsen</p>	<p>SIDS (<i>Small Island Developing State</i>) sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil mereka. Kenaikan permukaan laut terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, membuat solusi berkelanjutan untuk masalah iklim semakin mendesak.</p> <p>Kedadaan ini diperparah bahwa faktanya SIDS (<i>Small Island Developing State</i>) tidak memiliki</p>

			<p>sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur seperti bendungan untuk melindungi diri dari kenaikan permukaan laut. AOSIS (<i>Alliance of Small Island States</i>) adalah organisasi yang mewakili SIDS (<i>Small Island Developing States</i>) di forum internasional. Kehadiran AOSIS (<i>Alliance of Small Island States</i>) berusaha mendorong kebijakan iklim yang lebih ambisius dan efektif untuk melindungi warga negaranya.</p>
5	<p><i>No change from climate change: vulnerability and small island developing states</i></p>	Kelman	<p>Penelitian ini membahas bagaimana fokus pada perubahan iklim dapat mendepolisasi tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang kepulauan kecil SIDS (<i>Small Island Developing State</i>). Fokus pada perubahan iklim seringkali menekankan bahaya fisiknya, seperti kenaikan</p>

		<p>permukaan laut dan badai yang lebih kuat. Hal ini dapat mengabaikan kerentanan SIDS (<i>Small Island Developing State</i>) yang lebih dalam yang berasal dari faktor politik, sosial-ekonomi, dan historis. Akar masalah kerentanan SIDS (<i>Small Island Developing State</i>), seperti akses yang buruk terhadap sumber daya, ketidaksetaraan, dan marginalisasi, menjadi terabaikan.</p> <p>Fokus pada perubahan iklim dapat mengalihkan perhatian dari tantangan pembangunan jangka panjang lainnya yang dihadapi SIDS (<i>Small Island Developing State</i>). Selain isu perubahan iklim, SIDS (<i>Small Island Developing State</i>) juga menghadapi banyak tantangan lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang sama pentingnya</p>
--	--	---

			<p>dengan perubahan iklim. Terlalu fokus pada perubahan iklim dapat menghambat upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan lainnya.</p> <p>Bencana dan krisis dapat menciptakan momentum untuk membangun kembali komunitas dengan cara yang lebih tangguh dan mengurangi kerentanan. Namun, fokus berlebihan pada perubahan iklim dapat mengalihkan perhatian dari peluang-peluang ini.</p>
--	--	--	---

Sumber : Penulis

Berdasarkan analisis dari lima tinjauan literatur di atas memberikan penulis pemahaman tentang Implementasi NDC (*Nationally Determined Contributions*) negara-negara Pasifik Selatan dalam mengatasi isu perubahan iklim. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa wilayah Pasifik Selatan menghadapi ancaman yang nyata dan serius terkait kenaikan permukaan air laut. UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) sebagai rezim internasional yang dalam konteks ini mengatasi perubahan iklim, berperan penting dalam menangani isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan dengan

melakukan kerjasama Internasional maupun kerjasama regional untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim, serta mengimplementasikan bantuan program di wilayah Pasifik Selatan.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka konseptual atau kritis diperlukan di dalam setiap penelitian guna dapat menyajikan adanya teori yang dapat dipergunakan dalam memperbaharui ataupun menganalisis suatu fenomena yang didasari kepada adanya sudut pandang yang berbeda. Dimana di dalam kerangka teoritis pula, suatu Teori maupun konsep yang dipergunakan dapat mengejawantahkan terkait dengan adanya tingkat abstraksi, kompleksitas, klasifikasi, hingga ruang lingkup dari bagaimana teori tersebut dapat dipergunakan di dalam suatu penelitian. Sehingga, melalui adanya Kerangka Teoritis pula mampu menjelaskan mengenai adanya unit eksplanasi dan unit analisis penelitian. Guna dapat menjawab adanya rumusan masalah pada penelitian yang diangkat di dalam penelitian penulis, adanya teori dan juga konsep yang bersumberkan atas adanya pemikiran dari para ahli Hubungan Internasional dipergunakan oleh penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang dimana memiliki tata cara penyusunan penelitian melalui hal umum yang terdahulu, yang kemudian dihubungkan kedalam bagian-bagian yang lebih khusus.

2.2.1 Rezim Internasional

Ruggie mendefinisikan rezim internasional sebagai perilaku internasional yang terinstitusional. Rezim adalah sekumpulan prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional (Krasner, 1982). Sistem internasional

muncul dari keinginan orang-orang yang berpikiran sama. Peraturan yang disepakati mengikat para pihak yang terlibat, namun tanpa kewajiban, karena sistem tersebut dijadikan acuan dalam komunikasi antar aktor internasional. Dengan tidak adanya kekuasaan koersif dalam pengelolaan atau peraturan, aktor dominan bisa berbuat sesukanya. Negara-negara berdaulat saling berkompromi ketika menyetujui peraturan. Itulah awal terbentuknya pemerintahan. Pihak berwenang bertanggung jawab melakukan pemantauan, namun tidak ada yang berani atau mau bereaksi ketika sistem dilanggar, karena tidak bertentangan dengan kepentingan mereka.

Pendapat dari Thomas Franck mengenai rezim yaitu bahwa aturan-aturan internasional mempunyai seruan normatif untuk dipatuhi selama aturan-aturan tersebut masih berlaku. Empat karakteristik peraturan yang meningkatkan legitimasi: (a) ketegasan dan kejelasan, (b) validasi simbolis dalam komunitas yang berpartisipasi, (c) konsistensi internal, dan (d) hubungan vertikal antara aturan-aturan utama yang mengikat yang mendasari sistem dan hierarki aturan sekunder yang mengidentifikasi sumber aturan dan mendefinisikan norma normatif yang menentukan pembuatan, interpretasi, dan penerapan aturan. Menurut Keohane, pemerintahan bisa menjadi kuat jika peraturannya komprehensif, tepat dan mencakup berbagai kegiatan. Jelasnya, sistem yang lemah mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang terbatas. Namun, sistem yang kuat mungkin menghadapi masalah kepatuhan, setidaknya dalam jangka pendek, karena jumlah kewajiban yang meragukan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan cakupan peraturan (Levy et al., 1995).

Sebagai rezim internasional yang khusus dalam mengatasi perubahan iklim global. UNFCCC memberikan kerangka kerja bagi negara-negara di seluruh dunia untuk berkolaborasi dalam menanggulangi dampak negatif dari perubahan iklim. UNFCCC memainkan peran penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan upaya global untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. UNFCCC menyediakan fasilitas yang memungkinkan negara-negara untuk merundingkan dan menetapkan kebijakan iklim secara kolektif. Melalui mekanisme *Conference of the Parties* (COP), negara-negara berkumpul setiap tahun untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan membuat keputusan strategis tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini menjadikan UNFCCC sebagai forum utama untuk diplomasi iklim, di mana kebijakan internasional dikembangkan dan diimplementasikan.

Kemudian, UNFCCC mengadopsi prinsip-prinsip yang mengikat semua negara anggota untuk mengambil tindakan berdasarkan tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Prinsip ini mengakui perbedaan kapasitas dan tanggung jawab negara-negara berkembang dan maju dalam kontribusi mereka terhadap masalah perubahan iklim. Sebagai contoh, Protokol Kyoto, yang diadopsi di bawah UNFCCC, menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ketat untuk negara-negara industri dibandingkan dengan negara-negara berkembang. UNFCCC telah berhasil mengadopsi perjanjian-perjanjian penting seperti Perjanjian Paris pada tahun 2015. Perjanjian Paris adalah tonggak penting dalam sejarah kebijakan iklim internasional karena melibatkan komitmen hampir semua negara di dunia untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius, dan berupaya mencapai batas 1,5 derajat

Celsius. Perjanjian ini juga memperkenalkan mekanisme transparansi dan pelaporan yang meningkatkan akuntabilitas negara-negara dalam memenuhi komitmen iklim mereka. UNFCCC sebagai rezim internasional mengkoordinasikan tindakan global melalui kerangka kerja yang inklusif dan fleksibel, dan menanggapi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara.

2.2.2 Konsep *Green Politics*

Landasan konsep *Green Politics* terletak pada aspirasi untuk membangun masyarakat yang ramah lingkungan dan berakar pada prinsip keadilan sosial dan pelestarian kehidupan. Hakikat demokrasi dibangun berdasarkan perilaku kolektif dan nilai-nilai budaya setiap individu. Konsep *Green Politics* berfungsi sebagai titik konvergensi gagasan lingkungan dan politik, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Perkembangan yang relatif baru dalam bidang politik kontemporer, yang dikenal sebagai *green politics*, tidak hanya memperoleh daya tarik dan berkembang dalam lanskap politik nasional, namun juga telah membuat terobosan signifikan dalam bidang politik global (Robyn Eckersley, 1992).

Konsep *Green Politics*, seperti yang dijelaskan oleh Eckersley, mencakup ciri khas ekosentrisme. Penolakan terhadap perspektif antroposentris, yang hanya mementingkan kepentingan moral manusia dan mengabaikan nilai intrinsik ekosistem dan seluruh makhluk hidup, merupakan prinsip inti ekosentrisme (Eckersley, 2004). Menurut Robert E Goodin sukses atau tidaknya *Green Politics* bergantung pada aktivis partai hijau (*green party*) itu sendiri. Jika mereka siap untuk berkompromi dan membentuk koalisi, partai-partai hijau mungkin akan membawa perubahan nyata terhadap politik dan kebijakan (Goodin, 1992).

Keterkaitan antara praktik lingkungan hidup, filosofi ramah lingkungan, dan politik sangatlah penting. Semua posisi politik dan ekonomi meskipun secara implisit mempunyai dasar etika ekologi tertentu. Demikian pula, setiap posisi ekologis harus menyiratkan keputusan politik tentang bagaimana posisi tersebut dapat diterima dan dipraktikkan. Dengan demikian, posisi politik (dan teoritis) yang berbeda mungkin berhubungan dengan permasalahan lingkungan dan etika ekologi dengan cara yang berbeda. Khususnya mengenai isu lingkungan hidup yang semakin penting dalam hubungan internasional, terdapat peningkatan kesadaran akan permasalahan kelangkaan sumber daya, hujan asam, penipisan ozon dan pemanasan global (Steans et al., 2010).

Salah satu tujuan *Green Politics* adalah untuk menciptakan keadilan dengan memberi tahu orang-orang bahwa masih ada ketimpangan sumber daya. Hal ini dicapai dengan menunjukkan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Adanya jaminan kelestarian lingkungan untuk generasi berikutnya adalah inti dari konsep *green politics* (Goodin, 1992). *Green Politics* menunjukkan bahwa politik harus terlibat dalam melestarikan lingkungan hidup, terutama dalam menjaga keseimbangan sumber daya. Mereka membangun kebijakan lingkungan dengan menggunakan berbagai prinsip dan prinsip dari konsep *Green Politics*. Oleh karena itu, *Green Politics* dianggap sebagai salah satu ide yang membantu membangun teori sosial politik modern.

Konsep *green politics*, berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan keadilan ekologi (Dobson, 2007). *Green Politics* menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. UNFCCC (*United Nations Framework Convention*

on Climate Change) mendukung prinsip ini dengan membantu negara-negara di Pasifik Selatan mengembangkan kebijakan dan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Misalnya, melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs), negara-negara ini berkomitmen pada langkah-langkah konkret yang berfokus pada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan (UNDP, 2023). Keadilan ekologis, yang merupakan inti dari *green politics*, mengadvokasi distribusi yang adil dari manfaat dan beban lingkungan. UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) mencerminkan prinsip ini dengan memastikan negara-negara kecil dan berkembang di Pasifik Selatan, yang seringkali paling terdampak oleh perubahan iklim meskipun berkontribusi paling sedikit terhadap emisi global, negara-negara di wilayah Pasifik Selatan mendapatkan dukungan finansial dan teknis yang memadai, misalnya melalui GEF (*Global Environment Facility*) (Princesa et al., 2021).

Selain itu, *green politics* menekankan penggunaan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan lingkungan. UNFCCC (*United Nations Convention on Climate Change*) mendukung integrasi adaptasi perubahan iklim dengan manajemen risiko bencana melalui pendekatan berbasis ekosistem. Contoh nyatanya adalah proyek-proyek yang mempromosikan restorasi hutan mangrove dan terumbu karang, yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap badai dan kenaikan permukaan air laut, memberikan perlindungan bagi komunitas lokal sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati (PICCM, 2022).

2.2.3. Konsep *Environmental Security*

Dalam buku karya Ritta Floyd dan Richard A Matthew yang berjudul *Environmental Security: Approaches and Issues* menjelaskan definisi konsep keamanan lingkungan atau *Environmental Security* yaitu mengacu pada pemahaman dan perdebatan tentang keterkaitan antara perubahan lingkungan dan berbagai konsep keamanan. Hal tersebut mencakup tentang bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, dan degradasi lingkungan dapat mempengaruhi keamanan manusia secara nasional maupun global (Floyd & Matthew, 2013).

Kemudian dalam buku yang berjudul *Human and Environmental Security : an agenda for change*, konsep kemanan lingkungan mengacu pada isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi kesehatan, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan keamanan sumber daya air, yang kemudian keamanan lingkungan mencakup berbagai tantangan yang muncul dan diakibatkan karena interaksi manusia dan lingkungan seperti dampak perubahan iklim (Dodds & Pippard, 2005). Kemanan lingkungan secara tidak langsung menimbulkan berbagai dampak buruk bagi keamanan lainnya, seperti kemanan manusia, kemanan nasional, keamanan kesehatan, dan keamanan pangan.

Seperti yang dijelaskan oleh Nicole Detraz dan Michele M. Betsill, Keamanan lingkungan adalah salah satu dari dua wacana berbeda yang menghubungkan keamanan dan lingkungan, yang lainnya adalah konflik lingkungan. Wacana keamanan lingkungan memiliki pandangan yang relatif lebih luas mengenai hubungan antara keamanan dan lingkungan, dibandingkan dengan

wacana konflik lingkungan. Dalam wacana keamanan lingkungan, fokusnya adalah bagaimana degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan manusia, bukan hanya potensi konflik kekerasan. Wacana keamanan lingkungan menekankan pada bagaimana isu-isu lingkungan dapat menjadi ancaman bagi keamanan individu, masyarakat, dan sistem internasional, bukan hanya negara. Wacana keamanan lingkungan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah lingkungan untuk meningkatkan keamanan manusia secara keseluruhan, bukan hanya tanggapan militer terhadap konflik sumber daya. Artikel ini berargumen bahwa perdebatan historis perubahan iklim internasional telah dibentuk oleh wacana keamanan lingkungan, bukan oleh wacana konflik lingkungan. Singkatnya, konsep keamanan lingkungan berfokus pada implikasi keamanan manusia yang luas dari degradasi lingkungan, bukan hanya potensi konflik kekerasan atas sumber daya yang langka. Hal ini berbeda dengan wacana konflik lingkungan yang didefinisikan secara lebih sempit (Detraz & Betsill, 2009).

Dalam buku karya Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, berjudul *Security : A New Framework For Analysis*. Menjelaskan bahwa sektor lingkungan meneliti hubungan antara lingkungan dan keamanan. Hal ini mencakup isu-isu seperti polusi, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan degradasi lingkungan. Isu-isu lingkungan dapat disekuritisasi, yang berarti isu-isu tersebut dibingkai sebagai ancaman eksistensial yang membenarkan penggunaan langkah-langkah darurat. Sebagai contoh, perubahan iklim atau penipisan sumber daya dapat disekuritisasi sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu negara atau masyarakat. Implikasi keamanan lingkungan dari perubahan iklim sangat

menonjol bagi negara-negara kepulauan kecil, terutama yang diwakili oleh Aliansi Negara Kepulauan Kecil (AOSIS). Barry Buzan menyoroti bahwa negara-negara pulau kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas badai, dan intrusi air asin. Hal ini menyebabkan banyak negara kepulauan kecil yang terdampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang mengancam eksistensial bagi keberlangsungan negara-negara tersebut (Buzan et al., 1998).

Kawasan Pasifik Selatan menghadapi krisis perubahan iklim, dan juga menghadapi ancaman yang signifikan terhadap keamanan lingkungannya. Dengan ancaman kenaikan air laut dan degradasi pesisir, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan berada di dataran rendah yang sangat rentan terkena dampak kenaikan permukaan air laut. Erosi pesisir, intrusi air laut, dan badai yang sering terjadi menyebabkan kerusakan parah terhadap infrastruktur dan mengancam tempat tinggal bagi penduduk sekitar. Selain itu, kelangkaan air kekeringan, ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk sekitar juga terancam karena kegagalan panen, hilangnya lahan pertanian, dan hilangnya mata pencaharian tradisional. Komplikasi dari naiknya permukaan air laut, kekeringan, dan degradasi lingkungan akan mendorong perpindahan penduduk dan migrasi di kawasan Pasifik Selatan, hal ini secara tidak langsung akan membebani kapasitas tata kelola dan meningkatkan resiko konflik.

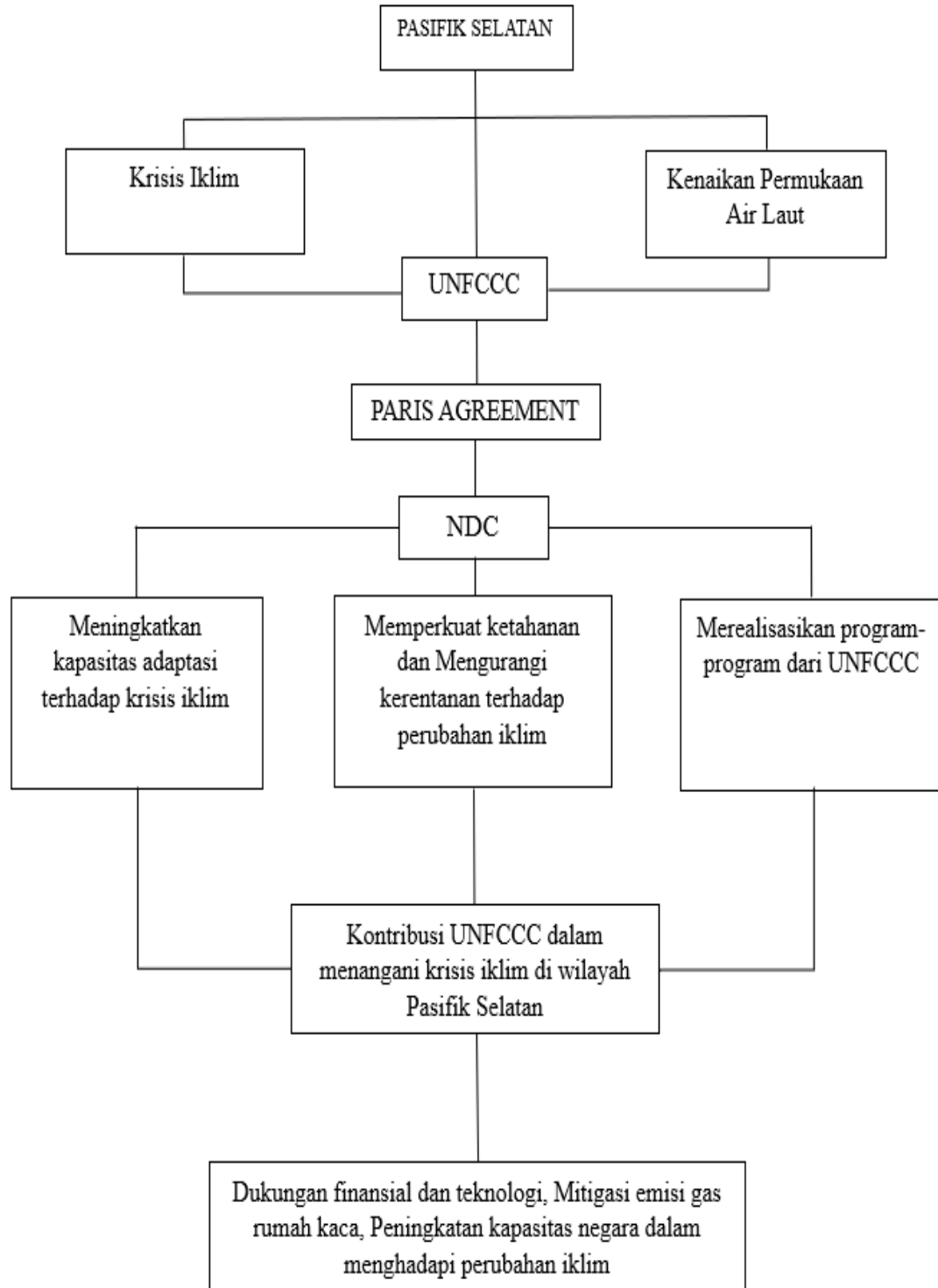
2.3 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam konteks penelitian mengacu pada keyakinan dan praktik dasar yang diterima penulis sebagai benar atau valid, meskipun asumsi tersebut tidak divalidasi atau dikonfirmasi oleh penelitian lebih lanjut. Dengan

menjelaskan temuannya, penulis dapat berkontribusi pada pengetahuan dengan menyajikan hasil yang kuat dan memvalidasi hipotesis. Oleh karena itu, penulis merangkum asumsi-asumsi berikut ini: “UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yaitu konvensi kerangka kerja PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berfokus pada isu perubahan iklim, mengimplementasikan NDC (*Nationally Determined Contributions*) dalam menangani isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan”.

2.4 Kerangka Analisis

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis



Sumber : Penulis